

RaTA (*Rapid Land Tenure Assessment*)

Sebuah upaya pembelajaran pemahaman konflik atas penguasaan sumberdaya alam.

ICRAF bekerja sama dengan WG-Tenure, Q-Bar, RMI, dan HuMA melaksanakan pelatihan/training RATA dan mengimplementasikan metode ini di beberapa daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari project yang didukung pendanaannya oleh *Partnership Governance Reform* (PGR). *Rapid Land Tenure Assessment* (RATA) dikemas dalam buku panduan ringkas yang dikembangkan oleh ICRAF bersama mitranya dan merupakan suatu alat untuk membantu meretas jalan bagi penyelesaian berbagai konflik tumpang tindih penguasaan tanah secara cepat. RaTA sebagai sebuah piranti sistematis mampu menilai, menganalisis, memahami, dan menjelaskan secara ringkas suatu masalah dan/atau konflik sistem penguasaan tanah yang tumpang tindih dan kompleks.

Dua lokasi dijadikan sebagai tempat dilakukannya pelatihan/training RATA yaitu Padang dan Ciamis, serta implementasi RATA di Ekosistem Halimun Jawa Barat.

Berikut petikan laporannya !!

Pelatihan

"*Rapid Land Tenure Assessment*" di Sumatera Barat: Mengkaji Penguasaan Ulayat (Sumber Daya Alam) dengan Cepat

Oleh : *Gamma Galudra* (ICRAF)

Sebagai salah satu bentuk pengembangan dan penyempurnaan metode *Rapid Land Tenure Assessment* (RaTA), alat analisis ini dicoba untuk diperkenalkan di Sumatera Barat bersama mitra kerja Q-Bar dalam bentuk seminar pelatihan yang bertepatan "Mengkaji Penguasaan Ulayat (Sumber Daya Alam) dengan Cepat" di Batusangkar tanggal 11-13 Mei 2008. Seminar ini dihadiri oleh 17 peserta baik dari LSM setempat seperti WALHI, PBHI, dan LBH serta wali/perwakilan Nagari seperti Guguk Malalo, Paninggahan, Sumpur dan Simarasok. Produk akhir dari pelatihan ini bukan hanya sekedar memberikan pemahaman kepada para peserta tentang masalah konflik tenurial, namun juga menjelaskan lebih baik bentuk dan sistem penguasaan tanah ulayat di Sumatera Barat serta bentuk dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Pelatihan ini diawali dengan perkenalan dan diskusi tentang RaTA, cara penggunaannya dan hasil akhir dari metode tersebut. Dari berbagai diskusi, para peserta menyadari bahwa konflik tenurial bukan hanya terjadi akibat kompetisi klaim atas sumber daya alam, namun oleh perbedaan kepentingan para pemangku kebijakan. Akibat yang terakhir inilah yang seringkali menyebabkan tumpang tindih klaim. Pelatihan tersebut memberikan

pemahaman bahwa tidak semua peserta memahami berbagai penyebab konflik tenurial yang ada di Indonesia.

Pelatihan kemudian berlanjut kepada analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*) beserta basis klaimnya. Satu Nagari, yaitu Nagari Guguk Malalo, dijadikan ilustrasi bagaimana RaTA menganalisis pemangku kepentingan dan basis klaimnya berdasarkan informasi dan jabaran umum dari peserta. Dari ilustrasi tersebut,



Foto : Q-Bar